



Kritik Epistemologi Feminis: Upaya De-Westernisasi Ilmu Pengetahuan dalam Perkembangan Konsep Feminisme di Korea Selatan

Kiara Citra Rasaski¹, Saras Dewi²

¹Program Magister Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

²Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

E-mail: kiara.citra11@ui.ac.id, saras.dewi@ui.ac.id

| Article Info | Abstract |
|---|--|
| Article History Received: 2023-01-15 Revised: 2023-02-22 Published: 2023-03-03 | Modernization and westernization that occurred massively in the early days of Korea caused Korea to experience poverty in the reproduction of science and knowledge that was colonized, especially in the context of feminism. The concept of feminism, justice, and equality for women's rights in Korea did not become an active discourse until 1993. Confucian principles which are the roots of Korean values and traditions are considered to suppress and limit women's space for movement, so that women's activism in Korea began to demand women's rights. basic rights. Using the method of criticism of feminist epistemology, this research was conducted to examine the influence of western thought on the conceptualization and practice of the concept of Feminism in Korean Confucian society and also its development in the contemporary era. Supported by the stand point theory by Sandra Harding, the researcher finds that de-westernization efforts are needed in science in order to find the "true colors" of Korean women themselves. The researcher also finds that deconstruction and re-conceptualization of science is necessary so that western feminism and Confucian values can go hand in hand in harmony. |
| Keywords: <i>Critique of Feminist Epistemology;</i> <i>De-westernization;</i> <i>Feminism;</i> <i>Confucianism,</i> <i>South Korea.</i> | |

| Artikel Info | Abstrak |
|---|---|
| Sejarah Artikel Diterima: 2023-01-15 Direvisi: 2023-02-22 Dipublikasi: 2023-03-03 | Modernisasi dan westerinasi yang terjadi secara masif di pada masa awal Korea menyebabkan Korea mengalami kemiskinan reproduksi ilmu pengetahuan serta ilmu pengetahuan yang terkolonisasi, khususnya dalam konteks feminisme. Konsep feminisme, keadilan, dan kesetaraan atas hak-hak perempuan di Korea belum menjadi diskursus aktif hingga tahun 1993. Prinsip Konfusianisme yang menjadi akar dari nilai dan tradisi Korea dianggap mengopresi dan membatasi ruang gerak perempuan, sehingga aktivisme perempuan di Korea dimulai untuk menuntut hak-hak dasarnya. Menggunakan metode kritik epistemologi feminis, penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaruh pemikiran barat terhadap konseptualisasi dan praktik konsep Feminisme dalam masyarakat Konfusianisme Korea dan juga perkembangannya pada era kontemporer. Didukung dengan teori stand point oleh Sandra Harding, peneliti menemukan bahwa diperlukannya upaya de-westernisasi dalam ilmu pengetahuan agar dapat menemukan "warna asli" dari perempuan Korea itu sendiri. Peneliti juga menemukan bahwa diperlukannya dekonstruksi dan rekonspetualisasi ilmu pengetahuan agar feminisme barat dan nilai Konfusius dapat berjalan beriringan secara harmonis. |
| Kata kunci: <i>Kritik Epistemologi</i> <i>Feminis;</i> <i>De-westernisasi;</i> <i>Feminisme;</i> <i>Konfusianisme;</i> <i>Korea Selatan.</i> | |

I. PENDAHULUAN

Gerakan feminisme yang terjadi secara global seolah membuka mata atas ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum perempuan. Besarnya pengaruh feminisme dengan cepat menyebar ke seluruh bagian dunia seiring adanya proses globalisasi dan westernisasi, tidak terkecuali Korea Selatan. Istilah feminisme pertama kali berasal dari Bahasa Perancis "féminisme" oleh seorang sosialis utopis, Charles Fourier. Penggunaan istilah ini baru digunakan dalam Bahasa Inggris pada tahun 1890-an dalam konteks gerakan persamaan hak politik dan juga hukum bagi perempuan (New World Encyclopaedia Contributors, 2017).

Aktivitas feminisme di Korea Selatan sudah ada sejak akhir abad ke-19. Pada mulanya, aktivitas ini sebagai bentuk perjuangan hak perempuan atas budaya dan politik patriarki Konfusianisme (Song-Woo, 2011). Aktivisme ini belum dianggap sebagai salah satu gerakan feminis, melainkan dikenal sebagai Minjung Undong. Gerakan Minjung Undong adalah salah satu bentuk protes sosial (gerakan sosial) yang dilakukan oleh buruh perempuan terkait kebijakan ekonomi Korea Selatan. Pada masa itu, buruh perempuan tidak mendapatkan upah yang sama dengan laki-laki hingga kekerasan seksual, sehingga buruh perempuan bergabung ke dalam protes Minjung Undong sebagai upaya mencari

keadilan dan kebebasan (Miriam Ching, 1995). Dengan demikian, agar dapat memahami praktik feminisme di Korea diperlukan pemahaman mengenai latar belakang sejarah Korea Selatan itu sendiri. Terlebih lagi, pemahaman bagaimana kedudukan perempuan dalam budaya Korea baik secara tradisional maupun modern dan kontemporer. Secara tradisional, peran utama perempuan didefinisikan sebagai seorang ibu yang mengurus keluarga dan posisinya akan selalu di bawah laki-laki (suami maupun anak laki-laki) (Heisook, 2014). Di dalam paham Konfusianisme, hierarki dan relasi kuasa adalah salah satu nilai utama yang dijunjung tinggi, sehingga menjadikan perempuan berada dalam posisi yang harus submisif dan tunduk kepada peraturan yang ada. Oleh sebab itu, Konfusianisme identik dengan patriarki dan mengopresi kaum perempuan (Deuchler, 1995).

Adanya paham bahwa posisi perempuan tidak lebih tinggi daripada laki-laki menyebabkan timbulnya perlawanan dari Perempuan Korea untuk memperjuangkan haknya. Jika ditelusuri lebih lanjut, beberapa pergerakan perempuan yang diinisiasi pada awal mula adalah tidak lain untuk mencapai kesetaraan dan keadilan dalam penerimaan upah. Perjuangan perempuan ini kemudian berfokus pada keadilan dan juga kesetaraan gender pada akhir 1980-an hingga tahun 1990-an. Secara garis besar, pergerakan aktivisme perempuan Korea Selatan dapat dilihat berdasarkan tiga babak, yaitu sebelum demokratisasi (sebelum abad ke-19), ketika dan sesudah aneksasi Jepang, dan setelah demokratisasi hingga modernisasi (Song-Woo, 2011, pp. 181-183). Babak pertama, di era sebelum demokratisasi, aktivisme perempuan masih memperjuangkan hak dan akses pendidikan yang diterima oleh perempuan. Hal-hal ini meliputi protes terhadap sistem pendidikan yang masih berpusat pada ajaran tradisional Konfusianisme dan sarat dengan nilai patriarki. Lebih lanjut, ajaran-ajaran ini masih bersifat turun menurut sejak Dinasti Yi, yaitu bertujuan untuk dapat memperkuat norma dan nilai sosial budaya masyarakat tradisional. Terlebih lagi, memberikan akses pendidikan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk dari usaha dalam memajukan perempuan di Korea Selatan pada era tersebut. Akan tetapi, pendidikan yang diterima oleh perempuan pada Dinasti Joseon bersifat indoktrinasi dan juga arahan-arahan untuk menjadi "perempuan yang baik" sesuai dengan ajaran konfusianisme (Song-Woo, 2011, pp. 183-184).

Babak kedua, ketika dan sesudah aneksasi Jepang. Pada masa adanya aneksasi Jepang (1910-1945), pergerakan aktivisme perempuan dikenal sebagai the second wave of women's activism in Sotuh Korea pada tahun 1905. Aktivisme ini dianggap sebagai salah satu gerakan terbesar dalam melawan imperialisme Jepang serta untuk mendapatkan kemerdekaan dari Jepang. Puncak pergerakan sosial ini adalah Samil Undong (1st march movement). Samil Undong adalah pergerakan sosial pada 1 Maret 1919 yang juga di dalamnya terdapat aktivisme perempuan (ibid, 2011). Salah satu protes yang dilakukan oleh perempuan saat itu adalah protes terhadap Jepang dalam mempekerjakan perempuan sebagai buruh pabrik tekstil dan membayarnya dengan upah kerja yang sangat rendah. Akibatnya, pada tahun 1924 muncul sebuah organisasi sosialisme perempuan Chosun-Yeosong-Dongwoheo (Women's Trade Union). Organisasi sosialisme perempuan yang memprotes pemerintahan Jepang atas eksploitasi tenaga kerja perempuan hingga kekerasan seksual. Selama bertahun-tahun perempuan Korea Selatan melakukan perlawanan, Jepang membubarkan paksa organisasi tersebut pada 1933.

Meskipun telah dibubarkan secara paksa oleh Jepang, anggota yang bertahan dalam organisasi tersebut mengubah organisasinya menjadi liberalist nationalist women's movement sebagai pendukung kemerdekaan Korea pada tahun 1945. Setelah liberasi dari Jepang dan terjadinya perang dingin, Amerika menyebarkan ideologinya dan melakukan pemberantasan secara masif terhadap organisasi-organisasi yang masih bercorak "komunis". Salah satu aktivisme perempuan yang digaungkan oleh Amerika adalah KNCW (Korean Council of Women) dan dianggap sebagai suksesor dari organisasi perempuan liberal lainnya karena pembentukan KNCW sejalan dengan sustainable Development Knowledge PBB (Song-Woo, 2011, pp. 185-187). Di babak ketiga, setelah demokratisasi dan modernisasi, pergerakan sosial mulai banyak muncul seiring terjadinya pembunuhan presiden Park Chung-Hee. Pergerakan sosial ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Minjok-ism (nationalism), Minju-ism (Democracy), dan Minjung-ism (Populism). Minjok-ism (nationalism) adalah protes yang juga menargetkan pada neo-imperialisme, sedangkan Minju-ism (Democracy) adalah oposisi terhadap perkembangan otoritas militer yang diktator, dan juga Minjung-ism (populism) adalah untuk dapat mempromosikan

kebebasan dari kolonialisme dan advokasi terhadap demokrasi (Song-Woo, 2011, p. 185). Dari sekian banyak pergerakan sosial yang terjadi, salah satunya adalah pergerakan perempuan yang mengusung konsep Minjung Women (perempuan yang teropresi). Minjung Women sendiri adalah kumpulan perempuan dari berbagai kalangan (pekerja, mahasiswa, hingga cendekiawan) yang sudah mulai menyadari pentingnya kesetaraan dan keadilan gender serta strata kelas sosial (Song-Woo, 2011, p. 186).

Berangkat dari Minjung Women, pengaruh feminisme barat mulai terasa di masyarakat Korea Selatan. Hal ini terlihat dari banyaknya akademisi perempuan yang mulai mendalami feminisme. Di tahun 1970-an, cendekiawan perempuan yang mempelajari feminisme sebagai besar terlibat dalam The Christian Academy (CA) (Song-Woo, 2011, pp. 186-187). Oleh sebab itu, banyak cendekiawan perempuan Korea membaca teori feminisme barat, menerjemahkan, dan mengadaptasi feminisme ke dalam konteks Korea. Banyaknya pengaruh barat dalam perkembangan ilmu feminis di Korea, membawa perubahan yang signifikan pada era kontemporer di Korea Selatan. Di era kontemporer, organisasi aktivisme perempuan lebih dikenal dengan sebutan "Young Feminism", yaitu kelompok yang mengklaim dirinya seorang feminis dan mendorong terciptanya keadilan gender. Akan tetapi, "young feminism" ini dinilai menyalahi budaya dan bahasa Korea karena tidak sejalan dengan ajaran Konfusianisme (ibid, 190-193).

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wacana feminisme barat memberikan dampak terhadap pembentukan dan perkembangan konsep feminisme yang ada di Korea Selatan saat ini serta bagaimana praksisnya di dalam masyarakat kontemporer Korea Selatan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan menggunakan metode kritik feminis. Kritik feminis atau lebih dikenal dengan sebutan kritik sastra feminisme adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkritisi ideologi yang berpusat pada dominasi dan jenis kelamin laki-laki. Kritik feminis ini biasanya dilakukan dengan penafsiran posisi laki-laki dalam suatu karya sastra (Kementerian Pendidikan dan Budaya, 2016). Meskipun kritik feminis ini lebih sering digunakan dalam menelaah karya sastra berangkat dari sudut pandang perempuan, tetapi kritik sastra tidak hanya terikat dengan sastra. Kritik feminisme

bertujuan untuk melihat bagaimana aspek budaya yang terbentuk inheren dengan patriarki atau dominasi laki-laki. Tujuan lainnya adalah untuk mengekspos diskriminasi serta misoginis terhadap perempuan, baik secara implisit maupun eksplisit. Dengan demikian, pada pembacaan terhadap suatu sastra, masyarakat, hingga produksi budaya lainnya memerlukan kontribusi perempuan agar menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang terbebas dari dominasi dan bias.

Perlunya pembacaan dari sudut pandang perempuan ini dikenal dengan istilah *reading as a woman*. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Culler yang mendefinisikan bahwa dengan membaca maka akan timbul kesadaran atau dugaan-dugaan terhadap dominasi laki-laki dan ideologi patriarki (Sugihastuti, 2005). *Reading as a woman* memerlukan unsur sosiologi dan budaya agar kritik yang disampaikan menjadi lebih komprehensif dan saling berkaitan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konfusianisme Korea

Sejak dahulu, Konfusianisme sudah menjadi bagian dari tiga pilar utama yang dapat membangun tradisi keagamaan di Korea bersama dengan Buddhisme dan Taoisme. Secara keseluruhan, Konfusianisme merupakan sebuah pemikiran atau cara pandang yang berakar kuat di dalam lembaga-lembaga politik dan etika sosial dari Timur (Buswell, 2007). Tradisi Konfusianisme bisa dikatakan cukup unik karena menekankan pada pembelajaran diri, budidaya diri, praktis kebijaksanaan, dan hubungan antar manusia. Lebih lanjut, Konfusianisme juga menjadi ajaran yang juga terdiri atas sekumpulan keyakinan dan norma-norma yang tersebar pada keluarga, moral, etika sosial dan adat. Konfusianisme sendiri adalah sebuah pemikiran atau cara pandang lama yang sudah berakar kuat di dalam lembaga-lembaga politik dan etika sosial. Norma dan nilai yang dibawa oleh Konfusianisme menuntun masyarakat Korea dari waktu ke waktu, khususnya dalam mengatur hubungan kekeluargaan masyarakat Korea. Terbentuknya Korea yang sekarang tidak lain dan tidak bukan karena pengaruh kuat yang dibawa oleh pengajaran Konfusianisme (Buswell, 2007).

Karakter masyarakat Korea yang khas juga terbentuk karena prinsip dan tradisi yang ditanamkan dari ajaran Konfusianisme. Melalui Konfusianisme, ia juga mengajarkan

standar moral yang digunakan setiap individu untuk menegakkan karakter moralnya dan mengajarkan tatanan moral dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak hanya pada ranah moral, Konfusianisme juga memandang tinggi pendidikan dan metode pendidikan. Hal ini juga kembali lagi pada nilai utama Konfusianisme, yaitu untuk membentuk dan mengembangkan karakter pribadi yang “Konfusian” atau bermoral. Tertanamnya nilai-nilai Konfusian dalam segala aspek kehidupan masyarakat Korea inilah yang menjadikan Konfusian sebagai prinsip dalam kehidupan masyarakat Korea. Jika dilihat berdasarkan sejarah, Konfusianisme tidak secara tiba-tiba hadir di Korea dan menjadi bagian dari “tubuh” budaya dan kepercayaan masyarakat Korea. Akan tetapi, proses “kesetubuhan” Konfusianisme dengan Korea membutuhkan waktu yang sangat lama. Konfusianisme memang suatu ajaran yang dibawa oleh Cina. Namun, karena letak geografis Korea yang pada saat itu relatif cukup dekat dengan Cina maka Cina banyak menyebarkan ajarannya kepada negara-negara tetangganya, sehingga ajaran Konfusianisme berkembang cukup pesat di Korea (Buswell, 2007).

Masuknya Konfusianisme di Korea memang tidak memiliki tanggal tepatnya, akan tetapi Konfusianisme di Korea mulai berkembang pada periode *Warring States* di Cina (403-221 Masehi), atau pada era tiga kerajaan Korea (Edward, 2015). Pada mulanya, Cina mengirimkan Konfusianisme untuk menguasai Korea secara prinsip pada akhir Dinasti Yun (1755-1122 Masehi). Keberadaan Konfusianisme terus berkembang hingga puncaknya berada pada abad ke-4, sebagaimana membaca tulisan Konfusian merupakan kewajiban di akademi Goguryeo. Di era tiga kerajaan inilah (Baekje-Silla-Goguryeo) menganggap bahwa Konfusianisme sebagai panduan yang ideal. Di era tiga kerajaan, ajaran atau kepercayaan bersirkulasi di Korea tidak hanya Konfusianisme tetapi juga ada Budhisme. Kendati demikian, para cendekiawan dan para *yangban* (bangsawan dan masyarakat kelas atas) lebih banyak mengikuti ajaran Konfusianisme, sehingga Konfusianisme memiliki lebih banyak pengikut. Pembeda lainnya dengan ajaran Budhisme adalah adanya alasan bahwa Konfusianisme lebih memfokuskan diri terhadap “kehidupan saat ini” daripada Budhisme yang

lebih berfokus pada kepada sesuatu yang “ilalahiah” (Edward, 2015). Meskipun adanya dua ajaran yang bersirkulasi, Konfusianisme dan Budhisme hadir berdampingan secara harmonis.

Berakhirnya era tiga kerajaan tidak menghentikan Konfusianisme untuk dapat terus menyebarkan ajarannya. Di Dinasti Goryeo, Konfusianisme tetap menjadi basis dari ideologi politik. Pada era ini pula, banyak pekerja dan juga intelektual melanjutkan kepercayaan Konfusianisme klasik dan menerapkannya dalam mengatur politik dan pemerintahan Dinasti Goryeo (Edward, 2015). Namun seiring berjalannya waktu, ajaran Konfusianisme klasik di Korea beralih menjadi ajaran Neo-Konfusianisme sebagai suatu sistem untuk mengatur masyarakat Korea dengan mengadopsi ajaran-ajaran Konfusianisme klasik. Transisi menuju Neo-Konfusianisme ini hadir sebagai ajaran untuk memperbaiki tatanan sosial politik Korea yang saat itu berantakan dan tidak terstruktur. Di Kerajaan Joseon (1392-1910), kehadiran Konfusianisme masih terus ada dan dijadikan sebagai ideologi untuk mengatur tatanan politik dan sosial pada era dinasti baru. Di era Joseon, Konfusianisme dianggap sebagai *blueprint* (gambaran rencana secara jelas) reformasi sosial, politik, hukum, tatanan moral, hubungan sosial, hingga pendidikan diatur berdasarkan prinsip-prinsip Konfusianisme. Upaya-upaya inilah yang dilakukan oleh para intelektual pada masa kerajaan sebelumnya dalam mengusahakan Konfusianisme agar terus ada sampai ke masa yang lebih modern. Di abad ke-17, sistem politik, birokrasi, struktur sosial, hubungan manusia, pendidikan dan pembelajaran, hingga aspek kehidupan di Korea adalah berbasis Konfusianisme seutuhnya. Kebijakan ini meliputi berbakti kepada orang tua, kesetiaan kepada raja, dan kepatuhan penuh hormat kepada yang lebih tua (Deuchler, 1992).

Lunturnya paham Konfusianisme di Dinasti Joseon ditandai dengan adanya invasi Jepang pada tahun 1866 dan invasi Amerika pada tahun 1871. Akibat adanya invasi dari kedua negara ini menyebabkan Korea harus “membuka diri” terhadap pengaruh negara luar dan dunia. Akibatnya, para cendekiawan dan politisi Korea merasa terancam dengan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh kedua negara tersebut. Beberapa kelompok Intelektual yang mewarisi ajaran Konfusianisme

menentang keras pengaruh Barat dan mempertahankan tradisi Konfusian. Kelompok reformis lainnya juga menuntut pembebasan dari Barat yang dianggap tidak realistis dan bertentangan dengan warisan Konfusianisme. Perjuangan ini bisa dikatakan perjuangan berat yang harus dihadapi oleh masyarakat Joseon pada saat itu karena pengaruh yang dibawa oleh Jepang dan Amerika begitu besar dan tak terbendung. Setelah perjuangan berat yang harus dilalui masyarakat Korea dalam melawan Jepang dan juga mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, penganut Konfusianisme yang tersisa kembali membangun ulang jaringan organisasi mereka. Pada tahun 1946, representasi dari penganut Konfusianisme berkumpul dan membentuk suatu organisasi yang berperan sebagai wadah bagi seluruh masyarakat penganut Konfusianisme pada saat itu. Pembentukan ulang organisasi ini adalah tidak lain karena adanya keinginan untuk menjadikan Konfusianisme kembali menjadi dasar ideologi dan prinsip masyarakat Korea (Edward, 2015).

Akan tetapi, keinginan para kaum intelektual dan masyarakat penganut Konfusianisme tidak bisa memenuhi keinginannya. *Cultural Bomb* yang dirasakan oleh masyarakat Korea akibat adanya modernisasi dan industrialisasi di Korea menyebabkan Korea sedikit kehilangan "jati diri Konfusianis"-nya. Pengaruh Barat modern yang masuk ke dalam masyarakat Korea mengancam nilai dan norma tradisional Korea (Konfusianisme), meskipun budaya yang masih digunakan dan juga berlangsung juga menjadi salah satu upaya menjaga warisan budaya Konfusianisme. Seiring pergerakan modernisasi dan industrialisasi yang terus menerus berlangsung, transisi Konfusianisme diterapkan sebagai prinsip dalam kehidupan masyarakat Korea sebagai bentuk dukungan atas integritas yang dimiliki oleh Konfusianisme.

Asimilasi hingga akulturasi budaya memang tidak bisa dihindari di Korea. Tetapi mereka mencari celahnya dengan menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kesopanan, rasa kekeluargaan, dan mementingkan kepentingan kelompok atas individu juga menjadi salah satu ciri Konfusianisme yang identik dengan masyarakat Korea. Tidak hanya berhenti sampai disitu, nilai moral Konfusianisme juga berkontribusi banyak dalam humanisasi masyarakat Korea. Bentuk

humanisasi ini kemudian terlihat dari semangat "*Uiri*" yang menjadi pendorong dan kekuatan dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan sosial. Arti dari semangat "*Uiri*" ini ditanamkan melalui pikiran Konfusianisme yang memproyeksikan dan menekankan kepentingan publik dan juga relevansi moral (Il-Bum, 2003).

2. "Suara" perempuan Korea: Feminis konfusianisme Im Yunjindang

Dinasti Joseon (1392-1910) ditandai sebagai pengaruh dalam sejarah pra-modern Korea dan kepercayaan tradisi Neo-Konfusianisme. Masyarakat Korea banyak mengalami perubahan signifikan sebagaimana Neo-Konfusian semakin mengakar dalam budaya dan masyarakat Dinasti Joseon. Meskipun adanya keresahan akan terjadinya "Konfusianisasi", kualitas dari masyarakatnya, khususnya sejarah perempuan pada masyarakat Joseon berhak mendapatkan perhatian lebih. Ajaran Konfusianisme memang memandang relasi antar individu sangatlah penting, tetapi relasi antara perempuan dan laki-laki masih menjadi permasalahan utama. Di dalam ajaran Konfusianisme, posisi laki-laki diyakini lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dalam istilah kosmologi bahwa *yang* (*heaven*) mendominasi *yin* (*earth*), yaitu laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan. Urutan hierarkis antar gender ini kemudian diyakini (secara kosmologis) dan fungsinya dianggap penting untuk membentuk tatanan yang baik. Dengan adanya keyakinan demikian, Konfusianisme kemudian membuat perbedaan antara ruang domestik untuk perempuan dan ruang publik untuk laki-laki (Deuchler, 1992, p. 231). Lebih lanjut, perbedaan ini dianggap perlu karena apabila disatukan dalam ruang lingkup yang sama maka akan timbul kekacauan sosial, sehingga Konfusianisme menetapkan posisi atau peran fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan ini membuat posisi perempuan menjadi lebih inferior dan harus patuh terhadap laki-laki.

Pengadopsian dan juga penerapan atas perbedaan fungsi laki-laki dan perempuan ini mengubah tatanan sosial Korea secara seutuhnya. Dampak yang dirasakan adalah representasi dan partisipasi perempuan dalam menjadi invanor perubahan sosial sangatlah minim, sehingga banyak pergera-

kan sosial pada masa awal Korea mayoritas hanya diikuti oleh laki-laki. Meskipun demikian, perempuan Korea pada masa itu masih bisa mendapatkan pendidikan meskipun hanya bersifat indoktrinasi, sehingga banyak perempuan Korea yang mengedukasi dirinya sendiri dan juga mengekspresikan perasaannya melalui tulisan-tulisan sastra seperti prosa, puisi, dan esai. Tidak banyak perempuan yang bisa menuliskan atau menghasilkan sebuah karya pada masa Dinasti Joseon karena adanya limitasi akses pendidikan, tetapi terdapat beberapa tokoh yang berhasil menciptakan karya terbaik. Salah satu tokoh terkenal pada masa Dinasti Joseon adalah Im Yunjidang yang merupakan seorang filsuf perempuan Neo-Konfusian yang tulisannya banyak mendeskripsikan terkait kehidupan perempuan pada masanya (Kim, 2007, p. 223).

Sebagai pelopor dalam filsuf konfusian perempuan pada masanya, ia berhasil menyajikan konsep "Feminisme Konfusianisme" sebagai suatu konsep yang menjunjung kesetaraan moral antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, Im Yunjidang juga berhasil melakukan penelaahan terhadap teks-teks klasik konfusianisme yang ada dan mengembangkan teorinya sendiri mengenai sifat manusia secara kritis. Pengembangan teori ini kemudian dikombinasikan dengan teori filosofis Neo-Konfusianisme Korea yang telah ada (Kim S. , 2014, p. 414). Meskipun Yunjidang mampu mengembangkan konsep "Feminisme Konfusianisme", masyarakat Korea pada masa itu banyak yang mengkritik Yunjidang karena ia tidak pernah secara proaktif memperjuangkan hak-hak perempuan, mengusulkan, atau merenungkan cara-cara praktis untuk memperbaiki kehidupan perempuan pada Dinasti Joseon yang sangat androsentris dan patriarkal. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Yunjidang bahwa ia hanya "bermain" pada ranah metafisika dan mengevaluasi androsentrisme Konfusianisme dari pandangan masa itu.

Tidak ada alasan khusus untuk berasumsi bahwa feminisme konfusius harus mengikuti jejak feminisme liberal barat modern, yang menekankan pada pembebasan perempuan. Namun, ketika Neo-Konfusianisme diletakkan sebagai sebuah sistem filosofis dan praktik sosial didasarkan pada onto-epistemologi secara radikal maka akan menghasilkan

perbedaan yang cukup signifikan. Tetapi, perkembangan feminis konfusianisme tidak bisa secara serta merta diimplementasi karena untuk dapat mengimplementasi suatu perubahan sosial yang bersifat progresif, tetap diperlukannya penyesuaian antara tradisi dan sistem yang sedang berlangsung. Perubahan ini merupakan pemahaman diri dan aspirasi moral perempuan yang sesuai dengan konteks sosiopolitik dan intelektual mereka sendiri (Kim S. , 2014). Pemikiran filosofis Im Yunjidang terkait Feminis Konfusianisme merupakan salah satu penemuan besar dan berharga dalam sejarah Korea. Feminis Konfusianisme ini juga merupakan sebuah teori yang menawarkan model otentik dari penggabungan antara Konfusianisme Korea dengan Feminisme. Gagasan "Feminisme Konfusianisme" pun mulai banyak berkembang (Kim S. , 2014, p. 396). Proses munculnya "Feminis Konfusianisme" ini dipicu karena adanya pengaruh feminisme barat yang mulai berkembang dan munculnya *care ethics* sehingga feminis konfusianis menjadi salah satu sarana dalam mengonstruksi feminisme konfusianisme serta melakukan penelaahan terhadapnya.

3. Feminisme Pasca Dinasti Joseon hingga Modern Korea

Berakhirnya Dinasti Joseon ditandai dengan masuk dan juga dimulainya okupansi Jepang di Korea. Selama 35 tahun (1910-1945), perempuan Korea banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam hal modernisasi dan menyadari identitas diri mereka sebagai perempuan koloni (Hei-sook, 2009, p. 248). Banyak perempuan Korea berpikir bahwa dengan ikut berpartisipasi dalam kelompok pergerakan kemerdekaan adalah salah satu cara untuk mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Lebih lanjut, melalui gerakan kelompok nasionalisme, para perempuan menganggap bahwa dirinya telah melakukan suatu hal yang berguna dan bermanfaat untuk negaranya. Maka fengan demikian, feminis nasionalis mengangkat kesadaran feminis perempuan Korea, khususnya ketika membicarakan mengenai pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Korea selama imperialisme Jepang. Akan tetapi, setelah okupansi Jepang berakhir dan Korea mendapatkan kemerdekaannya, para kelompok feminis dan kelompok nasionalis saling

bertentangan. Kelompok nasionalis masih percaya dan berusaha mempertahankan nilai tradisional konfusianisme, yaitu patriarki sebagai nilai utama budaya Korea Selatan bahkan setelah Korea merdeka (1945). Salah satu poin yang diperjuangkan adalah dengan mendefinisikan bahwa peran perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dan melestarikan nilai-nilai konfusianisme di dalam keluarganya (Hei-sook, 2006).

Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, pengaruh barat mulai banyak tersisipkan di Korea Selatan dan perlahan mulai mengambil alih beberapa konstitusi Korea. Banyak masyarakat Korea pada saat itu percaya bahwa masuknya ideologi barat adalah salah satu agenda propaganda untuk menguasai Korea. Tidak hanya itu, masyarakat Korea saat itu juga percaya bahwa bangsa barat adalah salah satu penyebab mengapa perempuan Korea melantarkan keluarganya dan mulai meninggalkan nilai-nilai konfusianisme. Pengaruh barat semakin terasa setelah tahun 1945 akibat adanya perang dingin. Hal ini menyebabkan ideologi barat hingga militer Amerika memiliki peran yang krusial dalam pembentukan masa depan Korea. Amerika mulai melakukan penghapusan terhadap organisasi-organisasi yang telah dibentuk oleh Jepang dan juga hanya meninggalkan kelompok-kelompok liberal. Akibatnya, banyak cendekiawan (terutama perempuan) mendapatkan ilmu pengetahuan dari barat. Kontribusi barat dalam proses penyebaran ilmu pengetahuan juga tersalurkan melalui *The Christian Academy* (CA) yang ditemukan oleh cendekiawan Kristen. *The Christian Academy* dibentuk untuk dapat meningkatkan kesadaran akan hak-haknya khususnya pada pekerja perempuan, pelajar, dan kaum intelektual perempuan lainnya pada tahun 1970-an. Dengan adanya organisasi ini, para cendekiawan perempuan Korea banyak membaca teori feminis barat dan menerjemahkannya untuk diterapkan pada konteks Korea (Song-Woo, 2010, p. 186). Tidak hanya itu, campur tangan barat terhadap Korea juga terlihat dari terbentuknya organisasi *Korean Women's Association United* (KWAU) dan menyelaraskan agendanya dengan *Sustainable Development Goals* milik PBB (Song-Woo, 2010).

Berangkat dari kejadian tersebut, tujuan utama dari aktivisme perempuan mengalami perubahan, yaitu mulai meningkatnya ke-

sadaran dan mulai "dirinya" sebagai manusia. Perubahan ini kemudian yang menjadikan aktivisme perempuan di Korea menjadi perjuangan atas hak asasi manusia. Disaat yang bersamaan, pada masa itu Korea sedang mengalami proses industrialisasi dan juga modernisasi secara besar-besaran sehingga tidak hanya laki-laki yang bekerja sebagai buruh pabrik, tetapi juga perempuan. Akibatnya, pemerintah Korea saat itu tidak begitu memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan masyarakatnya dan menjadikan ini sebagai pemicu timbulnya protes dari masyarakat yang dirugikan. Protes ini kemudian dikenal sebagai *Minjung Movement*, sebuah kombinasi antara aktivisme sosial dan perjuangan pembebasan perempuan (Louie, 1995, p. 417). Sejalan dengan tujuan utama perjuangan sosial mengenai interseksi antara gender dan kelas, melalui *Minjung movement* para perempuan Korea memperjuangkan hak asasi manusia yang juga didukung oleh KWAU hingga menghasilkan deklarasi "*Women as human beings*" (Louie, 1995).

Melihat dari tujuan dan agenda yang ada pada aktivisme perempuan Korea, nuansa retorika feminisme pos modern di dalamnya, khususnya feminisme marxisme sangat terasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa peran perempuan Korea didefinisikan sebagai "ibu rumah tangga" dan menjadi istri atau ibu yang berbakti kepada suami dan anak laki-lakinya. Tetapi, disaat yang bersamaan perempuan Korea juga harus bekerja di luar rumah dan menerima diskriminasi gender akibat dari lingkungan patriarki (Louie, 1995, p. 417). Oleh sebab itu, pengaruh feminisme cukup terasa pada masa awal demokratisasi di Korea dan memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan organisasi perempuan Korea. Jika dibandingkan antara *minjung movement* dengan ideologi marxisme, terdapat beberapa kesamaan di dalamnya yaitu adanya perjuangan kelas dengan diwarnai sedikit isu gender di dalamnya (Louie, 1995, pp. 424-426). Kombinasi antara perjuangan kelas dan gender ini kemudian dapat diperdalam menggunakan pendekatan interseksionalitas juga, sehingga melalui kedua metode tersebut dapat terlihat unsur-unsur yang berkontribusi dalam membentuk Korea saat ini. Melalui *minjung movement* ini pula perjuangan perempuan Korea dapat ditentukan (ibid, 427-428). Perubahan-perubahan yang terjadi

pada masyarakat Korea telah menyebabkan kenaikan kelompok-kelompok radikal. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, pengaruh barat yang semakin banyak membuat Korea terpengaruh dengan istilah "*third world*" sehingga menyebabkan perempuan Korea percaya bahwa untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dengan laki-laki hanya bisa tercapai dengan bantuan politik (Palley, 1990, p. 1151).

4. Perlawanan dan Upaya De-westernisasi

Banyaknya pengaruh yang dibawa oleh bangsa barat ke Korea memberikan dampak yang masif dalam mendefinisikan langkah berikutnya terhadap perkembangan teori feminisme di Korea. Adanya kepercayaan bahwa posisi perempuan selalu berada di posisi paling bawah dalam hierarki Konfusianisme membuat perjuangan perempuan terhadap hak-hak dasarnya menjadi suatu gebrakan besar. Akibatnya, kontradiksi yang timbul dari masyarakat Korea terkait perjuangan perempuan ini adalah dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap nilai-nilai tradisional Konfusianisme. Jadi, jika dikatakan bahwa pengaruh bangsa barat terhadap perempuan Korea adalah hanyalah propaganda semata untuk menghancurkan nilai-nilai tradisional konfusianisme juga tidak sepenuhnya salah. Hadirnya feminisme barat ke dalam masyarakat sosial Korea Selatan seperti membawa secercah harapan terhadap perempuan Korea untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Membebaskan perempuan dari belenggu patriarki yang mengopresi perempuan (Louie, 1995, pp. 425-426).

Di sisi lain, kehadiran feminisme barat ataupun ilmu pengetahuan di luar bangsanya sendiri, membuat Korea seolah menjadi "negara dunia ketiga" yang terkolonisasi oleh Barat. Dampak besar ini menyebabkan Korea mengalami fenomena "ilmu yang terkolonisasi" pada tahun 1990-an karena banyaknya implementasi ilmu pengetahuan dari Barat yang tidak disesuaikan dengan konteks budaya Korea (Louie, 1995). Selain itu, Korea juga mengalami "kemiskinan" ilmu karena tidak dapat memproduksi ilmu pengetahuannya sendiri sesuai dengan konteks sosial dan budayanya, sehingga Korea seperti kehilangan subjektivitas dan juga partikularitas yang dimiliki oleh perempuan Korea (Louie, 1995). Bentrokan antar kedua

teori besar ini, antara Barat dengan Konfusianisme, yang membuat semakin sulit untuk menemukan "identitas sebenarnya" dari feminisme Korea. Satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk meraih jawaban atas "identitas sejati" ini adalah dengan melakukan dekonstruksi dan konseptualisasi ulang atas definisi "feminisme" itu sendiri di Korea.

Kehadiran feminisme ke dalam realitas sosial di Korea banyak membantu para cendekiawan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh aktivisme perempuan, akan tetapi teori ini tidak dapat diaplikasikan secara keseluruhan dalam misi pencarian identitas sejati feminisme Korea. Kendati demikian, besarnya pengaruh budaya barat adalah dapat terciptanya pertanyaan-pertanyaan baru yang belum pernah terlintas sebelumnya. Salah satunya adalah dengan masuknya pengaruh feminisme pos modernisme di Korea banyak mengubah persepsi mengenai perempuan serta hubungan antara laki-laki dan perempuan (Sook-in, 2003). Feminisme barat cukup berhasil dalam menempatkan perempuan Korea (dirinya sendiri) sebagai subjek dalam proses produksi ilmu pengetahuan, meskipun pada akhirnya menjadikan Korea sebagai budaya yang terkolonisasi. Berdasarkan sejarah, Korea tidak hanya menerima pengaruh yang cukup intens dari Barat saja, melainkan juga dari ideologi Konfusianisme Cina. Hal inilah yang membuat nilai yang dimiliki oleh Korea cukup mirip dengan Cina, khususnya dalam sejarah perempuan Korea, konsep mengenai "perempuan" banyak terbentuk berdasarkan perspektif Cina. Tidak jarang pula perempuan Korea pada masa Dinasti Joseon meniru perempuan Cina (Sook-in, 2003, pp. 200-203). Melihat dua pengaruh besar yang bersirkulasi, Korea seolah dihadapkan dengan permasalahan pos kolonial dan kolonialisasi baru di saat yang bersamaan. Oleh sebab itu, diperlukannya dekonstruksi dan konseptualisasi ulang terhadap produksi ilmu pengetahuan Korea bertujuan untuk mencari identitas sejati atau makna sebenarnya dari "feminisme Korea".

Di masa pos kolonial, "senjata" yang digunakan bukanlah artileri dan sejenisnya, melainkan "*Culture Bomb*", yaitu pengaruh budaya besar-besaran kepada negara yang dikoloni. Melalui *culture bomb* inilah secara tidak langsung membuat negara yang terkoloni merasa jauh bahkan terasing dari

budayanya sendiri. Mereka akan merasa bahwa bahasa, budaya, lingkungan, solidaritas, dan bahkan dirinya sendiri merasa teralienasi dengan budaya asli mereka. Hal-hal yang melebur dalam kehidupan sehari-hari inilah yang menjadikan suatu negara dapat dengan mudah dikuasai, termasuk Korea (Sook-in, 2003, pp. 205-207). Mengutip Chandra Mohanty, seorang tokoh feminis pos kolonial dalam bukunya *Feminism Without Borders* (2003), menyebutkan bahwa perempuan pada dunia ketiga adalah (manusia) yang teropresi dan terikat pada satu sistem patriarki (Mohanty, 2003). Kendati demikian, pengaruh barat dalam Korea membawa beberapa nilai penting, salah satunya adalah membuat perempuan Korea menyadari atas haknya yang selama ini mereka tidak bisa dapatkan. Meskipun demikian, Korea dengan keberagaman dan keunikannya tidak bisa dianalisis menggunakan suatu teori yang bersifat "universal" selayaknya teori barat. Artinya, terdapat beberapa perbedaan posisi antara realitas perempuan Korea dan JUGA pengalaman historinya dengan apa yang dimiliki oleh bangsa barat.

Tidak hanya sampai disana, problematika perbedaan antara barat dan timur juga terus berlanjut. Kelanjutan ini terlihat dari wacana barat yang mulai mengambil alih Korea sehingga terciptanya fenomena "*Colonization of Korean Feminist Theory*" pada tahun 1990-an. Salah satu alasan yang melatarbelakangi terjadinya fenomena ini adalah ketergantungan akademisi Korea terhadap ilmu-ilmu yang dibawa oleh Amerika, serta didukung oleh hegemoni pengetahuan yang dilakukan oleh Amerika. Oleh sebab itu, pada tahun 1990-an, Korea tidak begitu memperhatikan praktik dari pergerakan sosialnya dan hanya terfokus pada isu-isu barat atau modernisasi (Sook-in, 2003, pp. 210-213). Akibatnya, subjektivitas perempuan Korea tidak lagi dilihat berdasarkan perspektif budaya Korea, tetapi perspektif barat. Pergeseran subjektivitas terhadap perempuan Korea ini tidak lain disebabkan oleh implementasi teori feminisme barat yang tidak dikaji ulang disesuaikan dengan konteks budaya Korea, sehingga partikularitas dan nilai-nilai Korea termarginalisasikan (Kang, 2014, pp. 182-183). Upaya pemisahan diri dari pengaruh barat dan Cina telah dilakukan dengan mengkritisi kedua konsep atau ideologi tersebut. Para akademisi Korea

percaya bahwa praksis dari feminisme barat dilakukan secara terselubung di bawah nama "feminis poskolonial" dan pusat pengetahuan feminisme barat adalah didasari oleh "sentralitas barat" (Orientalisme) (ibid, 183).

Menggabungkan dua teori yang memiliki perbedaan posisi memang tidak bisa dilakukan secara langsung tanpa penyesuaian konteks budaya. Oleh sebab itu, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menemukan identitas atau realitas sebenarnya adalah dengan mendekonstruksi teori itu sendiri, sehingga nantinya akan terlihat bagaimana konsep otonomi antara feminisme barat dan realitas sosial Korea dapat kompatibel satu dengan yang lainnya. Melalui dekonstruksi pengetahuan ini pula, diperlukan adanya penekanan bahwa masih adanya nilai-nilai tradisional Korea yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nilai-nilai ini terefleksikan pada tahun 1990an, ketika karakter "individualisme" yang dimiliki oleh feminisme barat tidak sejalan dengan nilai Konfusianisme yang menjunjung nilai "kekeluargaan" dan "kebersamaan" (Sook-in, 2003, pp. 218-219).

Perdebatan antara tradisi dan subjek pos kolonialisme adalah suatu hal yang tidak pernah ada di barat. Perdebatan inilah yang hanya terjadi pada negara-negara timur yang masih memiliki dan menegakkan tradisi yang ada. Dengan demikian, penggabungan antara konservatisme dengan nilai patriarki Asia adalah strategi yang diperlukan Korea agar keduanya dapat berjalan beriringan. Proses dekonstruksi ini seharusnya memberikan sedikit jawaban maupun analisis material ideologi terhadap apa itu "tradisi" budaya. Tidak hanya itu, melalui proses dekonstruksi ini pula memungkinkan untuk melangkah lebih lanjut dalam pembentukan konsep baru tentang tradisi dan tradisionalisme (Sook-in, 2003, p. 219). Selain itu, menghubungkan antara nilai-nilai Konfusianisme dengan realitas perempuan juga diperlukan.

Peninjauan ulang atas hubungan ajaran Konfusianisme dengan realita perempuan juga diperlukan untuk menentukan perkembangan lebih lanjut feminisme Korea. Apa yang membuat ajaran Konfusianisme berpusat pada laki-laki sebagai sistem ideologinya adalah karena ia tidak melibatkan perempuan dalam proses pencarian nilai kebenaran dan kebijaksanaan. Posisi perempuan dipahami hanya sebagai pembantu

dalam mengamankan otorisasi dan legitimasi laki-laki, sebagaimana konsep kosmologi *yin* dan *yang*. Di dalam Konfusianisme, relasi perempuan dan laki-laki dapat dikatakan sebagai teori peran karena mereka hanya menjalankan teori *yin* dan *yang*, yaitu saling melengkapi satu sama lain (Sook-in, 2003, p. 220). Oleh sebab itu, diperlukan peninjauan ulang terhadap peran gender untuk dapat menentukan kapasitas dan perlakuan yang sama dalam suatu konstitusi sosial. Melalui dekonstruksi dan rekonseptualisasi, sistem pengetahuan yang “menjajah” perempuan Korea harus dipisahkan agar dapat menghasilkan pengetahuan feminis yang berpusat pada perempuan Korea. Oleh karena itu, persamaan antara struktur budaya dan politik dalam sistem pengetahuan perempuan Korea dapat diidentifikasi melalui pendekatan genealogis. Dengan melakukan pemisahan terhadap standar barat dan menentukan bahwa Korea, khususnya perempuannya, dapat dikatakan sebagai korban dari feminis pos kolonialisme. Untuk dapat mencapai sistem pengetahuan yang berpusat pada perempuan Korea maka diperlukan pula pengaplikasian pengetahuan Konfusianisme dan pengetahuan feminisme dan mengambil poin-poin koherensi antar keduanya (Sook-in, 2003, p. 223).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa rekonseptualisasi ulang mengenai konsep feminisme di Korea diperlukan. Rekonseptualisasi ini dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan ulang dan dikursus dengan tokoh intelektual tradisional Korea, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber primer yang kritis. Selanjutnya adalah identitas dan realitas feminisme Korea hanya terkubur oleh hegemoni dan relasi kuasa pengetahuan yang bersirkulasi di Korea. Salah satu contoh riil yang terjadi di masyarakat Korea adalah adanya pemaksaan *centered subjectivity* yang dimiliki oleh feminisme barat sehingga menghilangkan identitas dan keunikan dari pengetahuan Korea itu sendiri (Kang, 2014, p. 184). Oleh sebab itu, peninjauan ulang atas korelasi dan koherensi antara Konfusianisme dan Feminisme sangat diperlukan. Terlebih lagi ketika subjektivitas perempuan pada tiap budaya memiliki posisi yang berbeda, sehingga poin-poin partikularitas Korea perlu kembali diingat. Korea perlu memberikan batasan antara pengetahuan Asia dan Barat sebagaimana keduanya

memiliki perbedaan nilai dan ideologi yang terkonstitusi dalam masyarakat dan struktur sosialnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang tercermin dalam berbagai bentuk kehidupan perempuan di Korea.

5. Refleksi konsep *Ren* dalam aktivisme perempuan Korea

Berangkat dari sejarah perjuangan panjang perempuan Korea, keinginan atas terciptanya keadilan, kesetaraan, serta kesempatan yang sama seperti laki-laki ini sejalan dengan konsep *Ren* pada Konfusianisme. Konsep *Ren* adalah sebuah konsep yang menilai bahwa kebaikan manusia merupakan basis dalam etika maupun teori politik Konfusian. Di dalam konsep *Ren*, kasih sayang, kebaikan, dan harmoni antar individu merupakan dasar dari terwujudnya konsep ini. Selain itu, kebaikan di sini juga merujuk pada pemenuhan kewajiban seseorang terhadap sesama manusia, sehingga sering kali konsep *Ren* (maupun Konfusianisme) sangat berciri humanisme. Di dalam kitab Konfusianisme, *Ren* merupakan konsep utama yang menjunjung tinggi moral manusia, khususnya dalam hal cinta kasih dan juga keharmonisan. Keharmonisan tidak akan tercapai jika keadilan, kesetaraan, serta perikemanusiaan tidak hadir dan berkontribusi di dalamnya. Secara garis besar, konsep *Ren* ini mencakup pula nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sebagaimana manusia dituntut untuk saling menghargai dan tidak membedakan satu sama lain.

Implementasi dan penekanan konsep *Ren* ini terlihat pada aktivisme perempuan di Korea pada masa Dinasti Joseon hingga Korea saat masa modernisasi dan westernisasi. Pada mulanya, pergerakan sosial hanya diikuti oleh laki-laki saja karena adanya pembagian ruang privat dan publik yang secara khusus dibagi untuk gender tertentu. Dengan demikian, keberadaan perempuan Korea sebagai “individu” bisa dikatakan tidak ada karena selama ini perempuan dianggap sebagai “peran pendukung” dari laki-laki. Untuk menentang dan membuktikan bahwa keyakinan tersebut salah, masyarakat perempuan Korea meyakini bahwa melalui partisipasi kelompok aktivisme perempuan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut (Heisook, 2014, p. 248). Oleh sebab itu, pada masa awal hingga pertengahan Dinasti Joseon, partisipasi perempuan

dalam inventor perubahan sosial sangatlah minim atau bahkan tidak ada sama sekali. Adanya demarkasi gender antara ruang publik dan ruang privat yang diperuntukkan secara khusus, menyebabkan ruang gerak perempuan menjadi terbatas, sehingga perempuan hanya dapat menyuarakan pendapatnya melalui karya-karya sastra seperti prosa, puisi, dan esai. Akibat adanya limitasi ini, perempuan Korea menjadi terasing dari ruang lingkup sosialnya dan juga dirinya sendiri. Salah satu alasan lainnya adalah Konfusianisme juga berkontribusi dalam mengopresi perempuan sebagaimana diyakini bahwa tidak diikutsertakannya perempuan dalam praktik *Ren* adalah karena adanya kepercayaan perempuan sebagai individu yang “tidak utuh” seperti laki-laki (Kim H., 2017, p. 5).

Perempuan Korea sebelumnya tidak memandang dirinya sebagai “manusia” dengan hak-hak dasar yang harus dipenuhi karena mereka telah didoktrin memiliki peran “pendukung” untuk laki-laki. Namun, keadaan ini berubah seiring pengaruh barat mulai masuk dan tersisipkan dalam praktik kesehariannya. Perempuan di Korea perlahan mulai menyadari dan memandang dirinya sebagai “manusia”, dari sinilah perempuan di Korea mulai berpartisipasi dan membentuk organisasi perempuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan antar gender. Perempuan Korea percaya bahwa untuk melawan subjugasi atau dominasi harus terdapat tirani sosial di dalamnya agar suara mereka didengar dan keberadaan mereka diakui dalam masyarakat sosial. Terbentuknya organisasi dan himpunan perempuan di Korea didasari karena adanya persamaan latar belakang, yaitu perlakuan yang tidak adil dan juga setara, serta tidak mendapatkan kesempatan yang sama selayaknya laki-laki. Ketika perempuan membela haknya yang paling dasar, mereka menghadapi struktur hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga perempuan harus berusaha dua kali lipat lebih keras untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Padahal, pemenuhan atas hak-hak mendasar setiap manusia adalah salah satu dasar dari nilai kemanusiaan yang universal. Perlakuan adil, pengakuan atas harkat dan martabat seorang individu, dan tidak membedakan antara gender ataupun kelas sosial juga termasuk ke dalam nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa masuknya pengaruh Barat serta implementasi wacana-wacana Barat menimbulkan kontradiksi-kontradiksi ke dalam masyarakat Korea. Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi nilai Konfusianisme, Korea Selatan menilai bahwa nilai-nilai substansi Barat menyebabkan masyarakat Korea meninggalkan nilai, prinsip, dan tradisi Konfusianisme, khususnya pada kaum perempuannya. Stigma serta limitasi perempuan dalam ruang lingkup sosial, akses terhadap pendidikan, serta ketidakadilan yang dialami oleh Perempuan Korea menyebabkan mereka menjadi kaum yang termarginalkan dalam budayanya sendiri. Di dalam sejarah Korea, perempuan dituntut untuk menjadi submisif dan menjadi “peran pendukung” untuk laki-laki. Ruang gerak serta akses pendidikan perempuan Korea sangat terbatas, sehingga pendidikan yang diterima oleh perempuan Korea hanya berupa indoktrinasi. Masuknya pengaruh Barat membawa sisi positif dan negatif disaat yang bersamaan, khususnya pada keberlangsungan hidup masyarakat perempuannya.

Wacana Barat membuka cakrawala baru untuk perempuan Korea karena telah menyadarkan dirinya atas hak-hak dasar yang mereka miliki serta memandang perempuan sebagai “individu”. Penyadaran ini kemudian membawa perempuan melakukan aktivisme sosial untuk membela hak-haknya. Awal mula perjuangan perempuan Korea tidak lain sedikit bercirikan “perjuangan kelas” dengan isu gender di dalamnya karena hal pertama yang mereka tuntut adalah kesamaan upah kerja dan akses yang adil. Berkat pengaruh Barat yang membuka mata perempuan Korea ini, banyak aktivisme perempuan di Korea Selatan mulai banyak disuarakan sejak demokratisasi Korea. Namun, di sisi lainnya, laki-laki di Korea dan pengikut konservatif memandang bahwa pengaruh Barat secara perlahan menghapuskan dan menjauhkan dari prinsip serta nilai tradisi Konfusianisme. Terlebih lagi, laki-laki di Korea percaya bahwa dengan masuknya pengaruh Barat ke dalam masyarakat Korea menyebabkan konsep *ren* pada Konfusianisme tidak lagi tercapai dan terefleksikan. Tidak hanya berhenti di situ, masuknya pengaruh barat ke Korea menyebabkan terjadinya kemiskinan reproduksi

ilmu – khususnya terkait gender – karena para cendekiawan perempuan yang berkiblat pada pengetahuan Barat. Akibatnya, pengetahuan Korea seakan “terkolonisasi” oleh Barat dan di dalam proses pengimplementasiannya tidak melibatkan proses penyesuaian konteks budaya.

Usaha perempuan Korea dalam pereproduksi ilmu yang bercirikan “Konfusian” serta mengimbangi dengan nilai-nilai Barat yang memederkakan perempuannya sudah banyak dilakukan. Meskipun demikian, bias pengetahuan yang dihasilkan masih kerap kali terjadi sehingga Korea masih kehilangan identitas serta partikularitasnya. Proses de-westernisasi sudah dilakukan oleh Korea sebagai bentuk perlawanan terhadap barat dalam upaya menjaga nilai dan tradisi konfusianisme. Para cendekiawan perempuan (feminis) Korea merasa bahwa untuk dapat menemukan identitas serta “warna asli” dari Korea diperlukannya dekonstruksi dan rekonseptualisasi pengetahuan terkait “perempuan” itu sendiri di Korea. Dengan demikian maka akan terlihat bagaimana kompatibilitas dan keharmonisan feminisme Barat dan juga Feminisme Konfusianisme dapat berjalan berdampingan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kritik Epistemologi Feminis: Upaya De-Westernisasi Ilmu Pengetahuan dalam Perkembangan Konsep Feminisme.

DAFTAR RUJUKAN

- New World Encyclopaedia Contributors. (2017, April 5). Feminism. Retrieved June 2022, from New World Encyclopaedia: <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/feminism>
- Miriam Ching, Y. L. (1995). Minjung feminism: Korean women's movement for gender and class liberation. *Women's Studies International Forum*, 417-430.
- Heisook, K. (2014). *Feminist Philosophy in Korea: Subjectivity of Korean Women*. Chicago Journals, 247-251.
- Deuchler, M. (1995). *The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology*. Harvard University Press.
- Song-Woo, H. (2011). *Mapping South Korean Women's Movements During and After Democratization: Shifting Identities*. Springer Science+Business.
- Buswell, R. E. (2007). *Religions of Korea in Practice*. Oxfordshire: Princeton University Press.
- Edward, C. (2015). *Korean Confucianism: Tradition and Modernity*. South Korea: The Academy of Korean Studies Press.
- Deuchler, M. (1992). *The Confucian Transformation of Korea: A Study of Society and Ideology*. London: Harvard University Press.
- Il-Bum, C. (2003). *Religion in Korea*. Seoul: Religious Affairs Office, Ministry of Culture and Tourism.
- Kim, Y. (2007). *Voices of Female Confucians*. In R. E. Jr., *Religions of Korea in Practice* (pp. 223-230). Oxfordshire: Princeton University Press.
- Kim, S. (2014). *The Way to Become a Female Sage: Im Yunjidang's Confucian Feminism*. *Journal of the History of Ideas*, 395-416.
- Hei-sook, K. (2009). *Feminist Philosophy in Korea: Subjectivity of Korean Women*. Chicago Journals.
- Hei-sook, K. (2006). *Multi-layered formation of subjectivity of Korean Women*. *Korean Journal of Women's Education*.
- Song-Woo, H. (2010). *Mapping South Korean Women's Movements During and After Democratization: Shifting Identities*. Springer Science+Business.
- Louie, M. C. (1995). *Minjung Feminism: Korean Women's Movement for Gender and Class Liberation*. Pergamon.
- Palley, M. L. (1990). *Women's Status in South Korea: Tradition and Change*. University of California Press.

- Sook-in, L. (2003). Criticism of the Colonialization of Korean Women (Feministic) Knowledge: Strategy of De-westernization and De-confucianism. The Research of Korean Foundation.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism Without Borders*. Duke University Press.
- Kang, K. H. (2014). Western Feminism and Korean Feminism. In J. I. Kang, *Contemporary Korean Political Thought in Search of a Post-Eurocentric Approach*. Lexington Books.
- Kim, H. (2017). Confucianism and Feminism in Korean Context. *Diogenes*, 1-7.
- Evitasari, A.D. (2021) Media Diorama dan Keaktifan Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran IPA. *Jurnal Riset Pendidikan Dasar*, Volume 3 (1), 4
- Djamarah, Syaiful Bahri, dkk. (2013). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Jalinus, N. & Ambiyar. (2016). *Media dan Sumber Belajar*. Jakarta: Kencana
- Mawardi. (2014). Pemberlakuan Kurikulum SD/MI Tahun 2013 Dan Implikasinya Terhadap Upaya Mmperbaiki Proses Pembelajaran Melalui PTK. *Sholaria*, Vol. 4, No. 3, September: 107 – 121.
- Mudjiono. (2015). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta
- Martorella, Peter H. (1994). *Social Studies For Elementary School Children, Developing Young Citizens*. New York: Maemillan College Publishing Company.
- Piskurich, G.M. (2015). *Rapid Instructinal Design: Learn IDE Fast and Right*. Hokoben, NJ: John Wiley & Son
- Pratiwi, D.A. (2021). *Konsep Dasar IPS*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini
- Satrianawati, M. P. (2018). *Media dan Sumber Belajar*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Sanjaya, Wina. (2014). *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siska, Yulia. (2016). *Konsep Dasar IPS untuk SD/MI*. Penerbit Garudhawaca
- Sites, R & Green, A. (2014). *Leaving ADDIE For SAM Field Guide*. Alexandra: ASTD Press
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N.S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Sufyadi, S. dkk. (2021). *Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Jakarta: Pusat Assesment dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Yunitha, E. & Mardawani. (2021). *Konsep Dasar IPS*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Song-Woo, H. (2011, January). Mapping South Korean Women's Movements During and After Democratization: Shifting Identities. pp. 181-203.